

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi tidak terlepas dari kehidupan manusia, dimana komunikasi merupakan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, baik secara individu, kelompok, maupun dalam organisasi. Secara umum, definisi komunikasi adalah sebuah proses pembentukan, penyampaian, penerimaan dan pengolahan pesan yang terjadi pada diri seorang dan atau dua orang atau lebih untuk tujuan tertentu.

Menurut Colquitt, LePine, dan Wesson (dalam Wibowo, 2014: 65) komunikasi adalah proses dengan mana informasi dan arti atau makna ditransfer dari *sender* kepada *receiver*. Pada hakikatnya komunikasi adalah merupakan proses penyampaian pesan informasi dari satu pihak baik individu, kelompok atau organisasi sebagai *sender* kepada pihak lain sebagai *receiver* untuk memahami dan terbuka peluang memberikan respon balik kepada *sender*.

Pada suatu organisasi atau perusahaan, komunikasi mempunyai peranan penting. Suatu kegiatan perusahaan maupun organisasi dapat berjalan dengan lancar, salah satunya dengan adanya komunikasi yang baik begitu sebaliknya, apabila komunikasi kurang atau bahkan tidak ada maka akan memberikan dampak yang buruk bagi perusahaan atau organisasi. Untuk membangun hubungan yang harmonis dalam organisasi, diperlukannya komunikasi yang baik melalui pembentukan komunikasi yang baik pula.

Komunikasi organisasi dapat didefinisikan sebagai pertunjukan dan penafsiran pesan diantara unit-unit komunikasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi tertentu. “Suatu organisasi terdiri dari unit-unit komunikasi dalam hubungan hirarkis antara satu dengan lainnya dan berfungsi dalam suatu lingkungan” (Pace & Faules, 2006) Komunikasi merupakan media untuk menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan mendapatkan saling pengertian. Komunikasi didalam suatu organisasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan diantara para anggota organisasi secara timbal balik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Romli (2014:1) korelasi antara ilmu komunikasi dengan organisasi terletak pada peninjauan yang fokus kepada manusia-manusia yang terlibat dalam mencapai tujuan organisasi tersebut. Organisasi yang berhasil mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh beberapa faktor antara lain, sumber daya manusia dalam hal ini adalah karyawan. Karyawan dituntut untuk memperhatikan kinerja yang baik. Seorang karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi dan baik dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran yang ditetapkan perusahaan,

Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor yang penting karena kemajuan organisasi atau perusahaan tergantung dari sumber daya yang dimiliki. Secara konseptual kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi, yaitu kinerja pegawai secara individu dan kinerja organisasi. Kinerja pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam organisasi. Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang telah dicapai dalam suatu organisasi. Kinerja pegawai dan kinerja organisasi mempunyai keterkaitan erat. Tercapainya tujuan organisasi tidak dapat

dilepaskan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang digunakan atau dijalankan oleh pegawai yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai tujuan organisasi tersebut. Menurut Mathis dan Jackson (2006:65) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan pegawai. Manajemen kinerja adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan atau organisasi, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di perusahaan tersebut.

kinerja yang baik dibentuk, salah satu penunjang yang dibutuhkan adalah ketepatan penempatan dalam struktur di organisasi. Wursanto (2003:108) mengungkapkan, dalam organisasi formal terdapat satuan-satuan organisasi, di mana di dalamnya terdapat jabatan, tugas wewenang, dan tanggung jawab serta peran atau fungsi tertentu. Satuan-satuan organisasi dan jabatan-jabatan itu saling berhubungan sehingga merupakan susunan hubungan-hubungan antar satuan-satuan organisasi, jabatan-jabatan, wewenang, pertanggung jawaban-pertanggung jawaban yang disebut struktur organisasi.

Mengutip dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pada BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1, Poin 2-4 menyatakan bahwa :

1. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah penenang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Hal pertama yang mendasar perlu dipahami adalah kedudukan DPRD. Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kepala Daerah memiliki kedudukan yang setara atau bersifat kemitraan. Tidak hanya kesetaraan dalam hal otoritas dalam kedudukan kerja tetapi seharusnya dalam hal tanggung jawab dan kapasitas dalam memastikan proses pemerintahan dan pembangunan berjalan dengan baik. DPRD dalam pemerintahan daerah mempunyai tiga fungsi utama yakni legislasi, anggaran dan pengawasan. Legislasi adalah proses pembuatan undang-undang serta regulasi. Fungsi anggaran/budgeting adalah memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan tepat sasaran, meliputi pembahasan anggaran belanja dan pendapatan daerah. Sedangkan pengawasan adalah DPRD sebagai pengawas dan pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah dan penggunaan anggaran.

Pelaksanaan fungsi DPRD tersebut dibantu oleh perangkat daerah dalam hal ini Sekretariat DPRD. Kedudukan Sekretariat DPRD Kota Bandung merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, secara teknik operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretaris DPRD membawahi Bagian Persidangan dan Perundang-undangan; Bagian Umum; Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan; Bagian Program dan Keuangan, dan Jabatan Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat DPRD sebagai bagian dari organisasi perangkat daerah mempunyai tugas dan fungsi yang sangat penting untuk keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Lembaga ini mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan administratif dan pemberian dukungan kepada DPRD dalam penyelenggaraan tugas, wewenang dan kewajibannya. Dapat dikatakan, Sekretariat DPRD memegang peranan penting bagi kegiatan DPRD, sehingga DPR tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik tanpa keberadaan dan dukungan Sekretariat DPRD. Sehingga, Sekretariat DPRD dituntut untuk mampu mengoptimalkan kinerjanya sebagai fasilitator DPRD.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pra penelitian yang dilakukan bersama pegawai Sekretariat DPRD Kota Bandung, bahwa kinerja aparatur sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung masih belum maksimal karena dipengaruhi oleh komunikasi dan koordinasi dari pimpinan kepada pegawai dalam hal ini adalah aparatur sipil negara, yang tidak jarang memicu kendala karena kurangnya koordinasi antar lini, pimpinan atau sesama pegawai. Ketika pimpinan memberikan tugas atau arahan pada pegawai, terkadang masih ada kesalahan tentang kejelasan tugas yang diberikan serta perbedaan pemahaman dari pegawai. Sehingga menghasilkan pekerjaan yang terhambat dan ketidaktepatan data.

Kinerja yang kurang maksimal terlihat saat penyelesaian Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) triwulan, pada kegiatan Bimbingan Teknis. SPJ merupakan laporan yang berisi tentang rincian pemakaian anggaran kantor, baik dari segi makan minum, perjalanan dinas pembelanjaan ATK dan lainnya semua kegiatan tersebut termasuk dalam laporan SPJ. Komunikasi organisasi yang baik menjadi salah satu yang diharapkan oleh organisasi baik pimpinan maupun pegawai untuk meminimalisir masalah individu dan masalah ketidakjelasan informasi pegawai atau bahkan sesama anggota mampu untuk menciptakan hubungan yang akrab antar pegawai yang pada hakikatnya mampu untuk memenuhi kebutuhan informasi sehingga menciptakan pencapaian kinerja yang optimal.

Berkenaan dengan penjelasan permasalahan di atas maka peneliti merasa tertarik melakukan penelitian tentang kinerja pegawai Sekretariat DPRD Kota Bandung dalam memenuhi tugas, pokok dan fungsinya, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah peneliti ini yaitu **“Sejauhmana Pengaruh Komunikasi Organisasi Pimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung?”**

1.2 Identifikasi Masalah

Peneliti membatasi kajian dan ruang lingkup penelitian, maka peneliti menentukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sejauh Mana Pengaruh **Lingkungan Informasi Pimpinan** Terhadap **Kinerja** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung?

2. Se jauh Mana Pengaruh **Ketidajelasan Informasi** Pimpinan Terhadap **Kinerja** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung?
3. Se jauh Mana Pengaruh **Aturan** Pimpinan Terhadap **Kinerja** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung?
4. Se jauh Mana Pengaruh **Siklus** Komunikasi Pimpinan Terhadap **Kinerja** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung?
5. Se jauhmana Pengaruh **Komunikasi Organisasi** Pimpinan Terhadap **Kualitas** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung?
6. Se jauhmana Pengaruh **Komunikasi Organisasi** Pimpinan Terhadap **Kuantitas** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung?
7. Se jauhmana Pengaruh **Komunikasi Organisasi** Pimpinan Terhadap **Ketepatan Waktu** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung?
8. Se jauh Mana Pengaruh **Komunikasi Organisasi** Pimpinan Terhadap **Efektivitas** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung?
9. Se jauhmana Pengaruh **Komunikasi Organisasi** Pimpinan Terhadap **Kemandirian** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Pada penelitian ini memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut :

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis dan mendeskripsikan lebih jelas mengenai Pengaruh Komunikasi Organisasi Pimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh **Lingkungan Informasi** Pimpinan Terhadap **Kinerja** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung.
2. Untuk Mengetahui Pengaruh **Kejelasan Informasi** Pimpinan Terhadap **Kinerja** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh **Aturan** Pimpinan Terhadap **Kinerja** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung.
4. Untuk Mengetahui Pengaruh **Siklus** Komunikasi Pimpinan Terhadap **Kinerja** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung.
5. Untuk Mengetahui Pengaruh **Komunikasi Organisasi** Pimpinan Terhadap **Kualitas** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung.
6. Untuk Mengetahui Pengaruh **Komunikasi Organisasi** Pimpinan Terhadap **Kuantitas** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung.
7. Untuk Mengetahui Pengaruh **Komunikasi Organisasi** Pimpinan Terhadap **Ketepatan Waktu** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung.
8. Untuk Mengetahui Pengaruh **Komunikasi Organisasi** Pimpinan Terhadap **Efektivitas** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung.
9. Untuk Mengetahui Pengaruh **Komunikasi Organisasi** Pimpinan Terhadap **Kemandirian** Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dapat dilihat dari segi teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang pemikiran dalam penerapan ilmu komunikasi sebagai disiplin ilmu pengetahuan, khususnya pada komunikasi organisasi dalam instansi pemerintahan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai bahan pengalaman dan pengetahuan serta bentuk aplikasi ilmu komunikasi yang diperoleh peneliti selama studi secara umum dan lebih menguasai materi pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja dalam instansi pemerintahan.

b. Bagi Universitas

Kegunaan penelitian ini berguna bagi mahasiswa Universitas Komputer Indonesia secara umum, mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi secara khusus. Dan sebagai *literature* bagi yang akan melaksanakan penelitian yang sama.

c. Bagi Sekretariat DPRD Kota Bandung

Bagi instansi, hasil penelitian ini sebagai informasi atau evaluasi mengenai Pengaruh Komunikasi Organisasi Pimpinan Terhadap Kinerja Aparatur Sipil Sekretariat DPRD Kota Bandung.